

ANALISIS JURNAL

MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PROGRAM STUDI : PGSD

KELAS : 2F

PENGAMPU : 1.Roy Kembar Habibi, M.Pd.

2. Drs, Rapani, M.Pd.

Oleh : Auliya Zahra Nafisya

NPM : 2413053191

Semester/Kelas : 2 (Dua) / 2F

“DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA”

Artikel ini mengupas bagaimana hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sila keempat Pancasila berbunyi, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," yang menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum daerah (Pilkada) adalah praktik demokrasi di tingkat lokal yang berfungsi untuk memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pada artikel tersebut penulis mengkritik efektivitas sistem pemilihan langsung dalam mewakili nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan partisipasi Masyarakat, kenyataannya pemilihan kepala daerah secara langsung sering menyebabkan konflik seperti adanya kecenderungan rendahnya tingkat partisipasi serta Implikasi dari demokratisasi di daerah tidak sepenuhnya mampu mengontrol proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada. Ini menunjukkan perlunya perubahan dalam cara pemilihan agar lebih sesuai dengan prinsip musyawarah dan keadilan sosial.

Artikel ini menunjukkan dasar filosofi bagi demokrasi Indonesia yang mengharuskan pemimpin dipilih melalui cara yang mencerminkan keinginan rakyat. Dalam konteks Pilkada, sila ini mengandung prinsip bahwa pemilihan pemimpin daerah harus melibatkan seluruh

lapisan masyarakat dan mengutamakan kebijaksanaan serta kemampuan para calon dalam membuat keputusan untuk kepentingan rakyat.